



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**20  
24**





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari No. 52 Oebobo Kupang, Telepon/Faksimile:  
(0380) 942697 Pos-el: biropbj@ntt prov.go.id Laman:  
[www.birobarjasntt.net](http://www.birobarjasntt.net)

**LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP TAHUN 2024**  
**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT**

<b>NO</b>	<b>REVIEWER</b>	<b>CATATAN/KOREKSI</b>
1.	Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM PBJ	a. Verifikasi capaian data tiap bagian, kendala pencapaian indicator dan PK tahun 2024 b. Perhitungan persentase capaian c. Edit penulisan, font, kerapihan dan konsistensi.
2.	Kepala Bagian Pengelolaan LPSE	
3.	Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa	

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS. Sp  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197503081999031004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Aspek Strategi Organisasi.....	4
1.5 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	4
1.6 Sumber Daya Aparatur.....	10
1.7 Isu Strategis.....	12
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	13
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	16
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	20
3.2 Akuntabilitas Kinerja .....	22
3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	32
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN.....	10
Tabel 1.2	Klasifikasi PNS.....	10
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional .....	10
Tabel 1.4	Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel 1.5	Jumlah PNS/CPNS menurut Kelompok Usia.....	11
Tabel 1.6	Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas .....	12
Tabel 2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja .....	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	17
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	18
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal .....	21
Tabel 3.2	Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender- Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog) .....	23
Tabel 3.3	Jumlah Paket PBJ Tahun 2024 Sumber APBD (DAU/DAK/SG) .....	23
Tabel 3.4	Jenis Paket PBJ Tahun 2024 Sumber APBD (DAU/DAK/SG) .....	24
Tabel 3.5	Jenis Paket PBJ Tahun 2024 Sumber APBN .....	25
Tabel 3.6	DAK Tahun 2024 .....	25
Tabel 3.7	DAU/SG Tahun 2024.....	26
Tabel 3.8	Capaian Indikator Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	27
Tabel 3.9	Capaian Indikator Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sejak tahun 2022 s.d 2024 .....	27
Tabel 3.10	Capaian Indikator Jumlah, jenis, dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif).....	29
Tabel 3.11	Capaian Indikator Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT.....	30
Tabel 3.12	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 .....	32
Tabel 3.13	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 .....	32
Tabel 3.14	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 .....	33
Tabel 3.15	Realisasi Penyerapan Anggaran pada 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan .....	33

## DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Organisasi Biro PBJ Setda Provinsi NTT .....	9
--	---

## KATA PENGANTAR

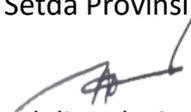
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan tentang pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/ lembaga Negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud yang mana merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban oleh sebuah organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indicator keberhasilannya dalam rangka pemcapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Target Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dan realisasinya. Secara umum, selama tahun 2024 sebagian besar sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung jawaban kepada *stakeholders* serta sebagai data dan informasi bagi peningkatan kinerja organisasi di tahun yang akan datang.

Kupang, Januari 2025

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Provinsi NTT,



Adelino da Cruz Soares, AKS., MPS.Sp.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750308 199903 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media informasi yang wajib dibuat oleh setiap Perangkat Daerah untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Capaian kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencapai hasil sesuai target. Pencapaian target kinerja dimaksud terdiri dari 2 (dua) sasaran penilaian target yaitu: (1) Berkenaan dengan Akuntabilitas Kinerja dan (2) Berkenaan dengan Akuntabilitas Keuangan.

Capaian Akuntabilitas Kinerja terdiri dari 5 (lima) Indikator yaitu: (1) Persentase jumlah pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan (Tender-Non Tender, *e-Purchasing*) mencapai 100%; (2) Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebesar 8 (delapan) orang (menunggu SK Gubernur) dari target 2024 sebanyak 4 (empat) orang; (3) Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif); (4). Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (monev) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT sebanyak 39 Laporan. Dari ke-empat indikator dimaksud, rata-rata pencapaian indikator sebesar diatas 200%. Sedangkan Capaian Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024, Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT mencapai 97.28% untuk melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dari nilai total anggaran terakhir yang dikelola sebesar Rp. 7.987.654.708,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pencapaian sebagaimana digambarkan di atas, dapat dicapai berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas seluruh pihak internal dan eksternal pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa. Namun disadari bahwa pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan kinerja untuk menjawab permasalahan dan hambatan di tahun 2024 dan tantangan di tahun ke depan. Biro Pengadaan Barang/Jasa selalu meningkatkan koordinasi terpadu secara komprehensif lintas perangkat daerah dalam rangka pencapaian target, sasaran kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian Visi/Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa (selanjutnya disingkat PBJ) mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. PBJ merupakan proses penyediaan barang dan/atau jasa untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Sebagian besar anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan setiap tahun dalam APBD/APBN berkaitan dengan PBJ. Untuk lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PBJ dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, bersaing, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta memberikan manfaat bagi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (*value for money*).

Ketentuan terkait PBJ dan kelembagaannya telah diatur dalam beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya telah mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah perlu memiliki sebuah organisasi khusus yang bertugas mengelola PBJ. Sejalan dengan semangat ketentuan itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT (Biro PBJ). Tujuan dibentuknya Biro PBJ untuk menjadi unit organisasi mandiri dan profesional dalam rangka

meningkatkan kinerja pelayanan publik pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Harapan menjadi unit organisasi yang mandiri dan profesional telah menyemangati Biro PBJ Setda Provinsi NTT untuk bekerja dan mendapatkan pengakuan secara nasional dari LKPP RI sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pusat Keunggulan (*Centre of Excellent*) pada 30 Oktober 2018. Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP), pada tanggal 17 Juli 2024 Biro PBJ Setda Provinsi NTT juga telah ditetapkan oleh LKPP RI sebagai organisasi mandiri yang memiliki Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif).

Secara khusus Biro PBJ Setda Provinsi NTT memiliki tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyusunan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan PBJ, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta Pembinaan dan Advokasi PBJ. Peran atau tugas tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 14 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai unit kerja yang melaksanakan kebijakan dibidang Pengelolaan PBJ, Pengelolaan LPSE serta Pembinaan dan Advokasi PBJ, organisasi ini dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dengan adanya pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan secara transparan dan periodik kepada pimpinan daerah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pelaporan tersebut wajib disampaikan agar Gubernur Nusa Tenggara Timur mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dikerjakan secara periodik, hambatan atau masalah yang dihadapi serta kebijakan yang bisa ditempuh untuk mengatasinya.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro PBJ Setda Provinsi NTT Tahun 2024 berpatokan pada beberapa ketentuan terkait:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

## **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan disusunnya LKIP Biro PBJ Setda Provinsi NTT Tahun 2024 adalah:

### **1. Maksud**

Untuk melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro PBJ Setda Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2024, termasuk permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang ditempuh.

### **2. Tujuan**

- a. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Biro PBJ Setda Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2024.

- b. Menganalisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Biro PBJ Setda Provinsi NTT Tahun 2024 untuk selanjutnya dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja.

#### **1.4. ASPEK STRATEGI ORGANISASI**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Biro PBJ Setda Provinsi NTT sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap proses PBJ lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta memberikan manfaat bagi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (*value for money*) yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan perekonomian nasional dan daerah.

#### **1.5. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Memperhatikan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas: *Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengekoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro PBJ Setda Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro PBJ Setda Provinsi NTT adalah organisasi perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Uraian tugas Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT adalah merumuskan program kerja Biro PBJ meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, terbuka, transparan, dipercaya dan tidak diskriminatif.

Adapun perincian tugas Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen

- masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;
  4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
  5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik;
  6. Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  7. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  8. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

9. Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rumusan uraian tugas sebagai berikut :

**1. Bagian Pengelolaan PBJ.**

Tugas Bagian Pengelolaan PBJ adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa meliputi pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan PBJ dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

**2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).**

Tugas Bagian Pengelolaan LPSE adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan LPSE yang meliputi pengelolaan system pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi serta pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

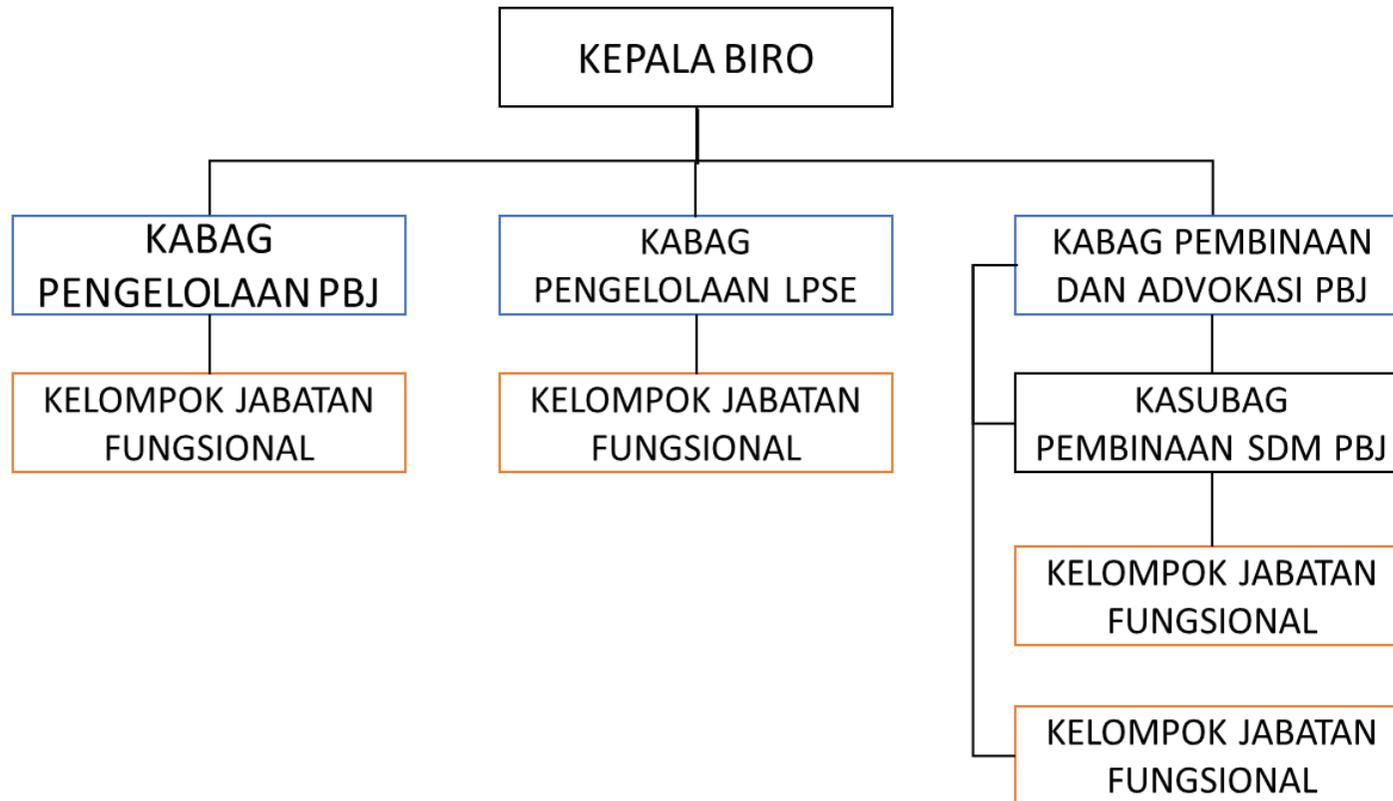
### **3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;**

Tugas Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ dibantu 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

**Bagan I.**  
**Struktur Organisasi Biro PBJ Setda Provinsi NTT**



*Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*

## 1.6. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung operasional dalam implementasi tugas dan fungsi Biro PBJ Setda Provinsi NTT, dalam tahun 2024 didukung oleh sumber daya aparatur dengan rincian jumlah ASN dan Tenaga Kontrak sebanyak **60 (enam puluh) orang**, dengan data terpilah sebagai berikut:

### a. Jumlah ASN

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN**

No	Klasifikasi ASN	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	43	36	7
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	17	8	9
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>44</b>	<b>16</b>

Sumber: Data Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Januari 2025

### b. Klasifikasi PNS

#### 1. Jumlah PNS menurut Golongan

**Tabel 1.2**  
**Klasifikasi PNS**

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	8	8	-
2	Golongan III	33	26	7
3	Golongan II	2	2	-
4	Golongan I	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>36</b>	<b>7</b>

Sumber: Data Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Januari 2025

#### 2. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-B	-	-	-
2	Pejabat Eselon III-A	3	3	-
3	Pejabat Eselon IV-A	1	1	-
4	Pejabat Fungsional	18	12	6
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>16</b>	<b>6</b>

Sumber: Data Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Januari 2025

3. Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	13	11	2
3	Sarjana (S-1)	27	22	5
4	Diploma III (D-III)	-	-	-
5	SLTA/SMK	3	3	-
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>36</b>	<b>7</b>

Sumber: Data Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Januari 2025.

Sesuai data tersebut dan dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM personil Biro PBJ Setda Provinsi NTT, pada tahun 2024 telah memberikan kesempatan kepada 4 (orang) PNS untuk menempuh studi lanjut melalui Tugas Belajar (Tubel) dan Ijin Belajar (Ibel). Dua orang Tubel masing-masing 1 (satu) orang di *University of Wallonggong* Australia jenjang pendidikan S3 dan 1 (satu) orang di Universitas Indonesia Jakarta jenjang pendidikan S2. Sedangkan Ibel diberikan kepada 2 (dua) orang untuk jenjang pendidikan S2 di Universitas Terbuka dan Universitas Muhamadiyah Kupang. Selain PNS diberikan kesempatan pula kepada Tenaga Kontrak untuk menempuh pendidikan S1.

4. Jumlah PNS/CPNS menurut Kelompok Usia

**Tabel 1.5**  
**Profil PNS/CPNS menurut Kelompok Usia**

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	51 - 60	17	15	2
2	41 - 50	20	16	4
3	31 - 40	5	4	1
4	21 - 30	1	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>36</b>	<b>7</b>

Sumber: Data Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Januari 2025

5. Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas**

No	Fungsi	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pengadministrasi Umum	15	6	9
2	Tenaga IT	2	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Sumber: Data Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Januari 2025

### 1.7. ISU STRATEGIS

Setelah memperhatikan dan mempelajari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur maka dirumuskan dan ditetapkan isu- isu strategis bidang pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Biro PBJ Setda Provinsi NTT memiliki peran dan tugas yang strategis. Strategis menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pengadaan barang/jasa, baik dari sisi kualitas dan kuantitas merupakan faktor penting dalam pencapaian target bidang pengadaan barang/jasa;
- c. Peningkatan manajemen pengadaan barang dan jasa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, adil, kompetitif, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu selanjutnya diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Biro PBJ Setda Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu perangkat daerah atau organisasi yang terintegrasi dalam Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTT. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan di tahun 2024 berpedoman pada RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. RENSTRA tersebut telah memuat beberapa hal substantif sebagai berikut:

##### a. Visi

Visi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT mengikuti Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yang dirumuskan sebagai berikut: **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

##### b. Misi

Berangkat dari visi tersebut, dijabarkan dalam Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan Manusia Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global.
3. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Demokratis Berdasarkan Hukum.
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Wilayah yang Berketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Keamanan.
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Wilayah yang Memiliki Keseimbangan dalam Pengelolaan Lingkungan.

6. Mewujudkan Posisi dan Peran Nusa Tenggara Timur dalam Pergaulan antar Negara, Daerah dan Masyarakat.
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Kepulauan dan Masyarakat Maritim.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, peran birokrasi pemerintahan sebagai lokomotif utama penyelenggara pemerintahan dan pembangunan sangat penting. Birokrasi memiliki tugas utama sebagai penyelenggara dan penjamin kelancaran roda pemerintahan. Birokrasi pemerintahan merupakan aktualisasi birokrat, aparatur pemerintahan berupa aktivitas atau tindakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara responsif dan memiliki komitmen serta konsistensi pada kepentingan publik.

#### c. Tujuan dan Sasaran

Sebagai bagian integral dalam birokrasi pemerintahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara adil, transparan dan bertanggung jawab dimana kesemuanya demi kepuasan masyarakat. Untuk itu berdasarkan Visi dan Misi di atas dapat dirumuskan tujuan RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, sebagai berikut: **“Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa”**.

Mempelajari rumusan tujuan tersebut di atas, maka secara umum arah tujuan pembangunan bidang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan birokrasi yang profesional, berintegritas, kinerja tinggi dan berorientasi kepada pelayanan publik;
2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku/pengelola pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang professional, integritas, kinerja tinggi dan bebas KKN;
3. Peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas, transparansi proses pengadaan barang/jasa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai sesuai RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 adalah: **“Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif”**.

Berdasarkan rumusan sasaran tersebut maka dirumuskan juga sasaran RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

1. Terlaksana keseluruhan jumlah Tender - Non Tender, *e-Purchasing*, Katalog Lokal dan Swakelola paket pengadaan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa;
3. Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
4. Terlaksana pengadaan barang dan jasa menggunakan metode Swakelola.

## 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2024 dibuat dan disusun dengan mengacu pada sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2024. Rencana kerja dimaksud menjadi bahan usulan dalam penyusunan rencana fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2024 yang diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi untuk semua Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dibawah ini terdapat 4 (empat) sasaran strategis sesuai dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja serta target yang diharapkan dapat direalisasikan di Tahun 2024.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksana proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jumlah, jenis, metode paket PBJ sesuai ketentuan (Tender - NonTender dan <i>E-Purchasing</i> )	100%
2.	Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan peraturan PBJ	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4 orang

3.	Terlaksananya PBJ yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN	Jumlah, jenis dan metode paket PBJ menggunakan SPSE (Metode Tender Kompetitif)	100%
4.	Terlaksananya PBJ menggunakan Metode Swakelola	Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan monitoring evaluasi PBJ dengan pihak eksternal terkait di lingkup Provinsi NTT	39 Laporan

Sumber: RENSTRA Setda Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Sasaran dan indikator kinerja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi kepada pejabat setingkat dibawahnya untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Biro PBJ Setda Provinsi NTT disusun dengan memperhatikan Dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target	Formula Indikator
			2023	2024	
1.	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jumlah, jenis, metode paket PBJ sesuai ketentuan (Tender – NonTender, e-Purchasing, e-Catalog)	100%	100%	$\frac{\text{Total Realisasi Paket PBJ}}{\text{Total Paket PBJ}} \times 100\%$

2.	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan peraturan PBJ	Jumlah jabatan Fungsional Pengelola PBJ	13 orang	4 orang	<u>Realisasi Penambahan JF PPBJ</u> Target Penambahan JF PPBJ <b>X</b> 100%
3.	Terlaksananya PBJ yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN	Jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode Tender Kompetisi).	100%	100%	<u>Total Paket PBJ yang menggunakan SPSE</u> Total Paket PBJ <b>X</b> 100%
4.	Terlaksananya pengadaan barang/ jasa menggunakan Swakelola	Pengendalian fungsi koordinasi, konsultasi, dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (Monev) PBJ dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT.	-	39 Laporan	<u>Jumlah Laporan Swakelola</u> 39 <b>X</b> 100%

Sumber: Perjanjian Kinerja, 2024

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Selanjutnya Program dan Kegiatan yang dikerjakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan peforma dan kinerja sesuai dengan tupoksi adalah:

**Tabel 2.3**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan		DPA	DPPA
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Rp</b>	<b>1.737.933.028</b>	<b>1.930.896.196</b>
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	68.951.704	78.956.704
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	79.222.672	17.209.672
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	347.031.456	554.785.956
	Kegiatan: Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.203.469.052	1.198.688.220
	Kegiatan: Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Rp	39.258.144	81.255.644
<b>2.</b>	<b>Program Kebijakan Dan Pelayanan PBJ</b>	<b>Rp</b>	<b>6.283.571.512</b>	<b>6.056.758.512</b>
	Kegiatan: Pengelolaan PBJ	Rp	166.647.433	190.197.433
	Kegiatan: Pengelolaan LPSE	Rp	241.701.727	246.182.727
	Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi PBJ	Rp	5.875.222.352	5.620.378.352
<b>T o t a l</b>		<b>Rp</b>	<b>8.021.504.540</b>	<b>7.987.654.708</b>

Sumber: DPA/DPPA Biro PBJ, 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan serta visi dan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan untuk menilai kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/*Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Ordinal**

No.	Skala Ordinal	Kesimpulan
1.	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2.	$70\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3.	$55\% < X < 70\%$	Cukup Berhasil
4.	$X \leq 55\%$	Belum Berhasil

Terkait dengan kedudukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT sebagai institusi unsur staf yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan maka capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah membawa manfaat bagi pemerintah maupun *stakeholders* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.

Pengukuran Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2024 disusun berdasarkan sasaran pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari beberapa sasaran strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran.

### **3.2. Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Sasaran terlaksananya proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku.**

Sasaran ini didukung dengan satu indikator yakni Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender- Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog) sebagaimana tercantum dalam tabel dibawa ini

**Tabel 3.2**

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender- Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender- Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog) terealisasi 100% jika dibandingkan sama seperti realisasi pada tahun 2023. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada rincian sebagaimana dibawah ini:

**Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender- Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog)**

Pada tahun 2023 indikator diatas mencapai target yaitu 100 % dan untuk tahun 2024 realisasi memenuhi target 100 % sebagaimana terdapat pada uraian dibawah ini :

- 1) Proses Pemilihan Penyedia Melalui Proses Tender APBD

Perkembangan data jumlah jenis paket PBJ Tahun 2024 berdasarkan DPA-DPPA Tahun 2024, sebagai berikut:

- (a) Paket PBJ Sumber Dana APBD (DAK/DAU)

**Tabel 3.3**

**Jumlah Paket PBJ Tahun 2024 Sumber APBD (DAK/DAU/SG)**

No	Jenis Paket	Jumlah	Pagu (Rp.)
1.	PBJ (selesai proses Tender/Seleksi, e-Purchasing dan/atau Penunjukan Langsung)	43 Paket	78.536.596.188

2.	PBJ Gagal Tender	1 Paket	11.409.400.000
3.	PBJ belum selesai proses	-	-
4.	PBJ terdampak rasionalisasi anggaran	-	-
<b>Total Paket PBJ TA. 2024</b>		<b>44 Paket</b>	<b>89.945.996.188</b>

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2024

Dari Tabel 3.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 44 Paket pada Tahun 2024, semua paket telah selesai dilaksanakan melalui proses Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung. Sedangkan 1 Paket Gagal Tender karena Waktu Pemilihannya tidak mencukupi. Paket dimaksud yakni berupa **Pekerjaan Ruang Rawat Jalan Radioterapi Tahap I (Pembangunan Ruang Rawat Jalan Radioterapi Tahap I)** yang berasal dari SKPD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

**Tabel 3.4**  
**Jenis Paket PBJ Tahun 2024**  
**Sumber APBD (DAK/DAU/SG)**

No	Jenis Paket	Jumlah	
		Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	16	78.111.680.561
2.	Barang	5	2.734.455.074
3.	Konsultansi	23	9.099.860.553
4.	Jasa Lain	-	-
<b>Total Paket</b>		<b>44</b>	<b>89.945.996.188</b>

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2024

Pada Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa dari 44 Jenis Paket Tahun 2024, terdapat 23 Jenis Paket PBJ yang bersumber dari DAK dan 21 Jenis Paket PBJ bersumber dari DAU/SG dengan rinciannya sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.

(b) Proses Pemilihan Penyedia Melalui Proses Tender APBN

**Tabel 3.5**  
**Jenis Paket PBJ Tahun 2024**  
**Sumber Dana APBN**

No	Jenis Paket	Jumlah	
		Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	-	-
2.	Barang	-	-
3.	Konsultansi	-	-
4.	Jasa Lain	-	-
<b>Total Paket</b>		-	-

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2024

Sesuai Tabel 3.5 di atas. untuk Tahun 2024 Biro PBJ tidak memperoleh paket PBJ yang bersumber dari APBN.

2) Realisasi Pemilihan Penyedia Menggunakan Metode Tender

Pada Tahun 2024, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima 44 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD (DAK/DAU/SG) dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

a. DAK

Pada Tahun 2024, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima 23 Paket PBJ yang bersumber dari DAU dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**DAK Tahun 2024**

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	10	48.008.012.250	10	48.008.012.250
2.	Barang	-	-	-	-
3.	Konsultansi	13	4.194.121.600	13	4.194.121.600
4.	Jasa Lain	-	-	-	-
<b>Total Paket</b>		<b>23</b>	<b>52.282.133.850</b>	<b>23</b>	<b>52.282.133.850</b>

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2024

Dari 10 jenis paket pekerjaan Konstruksi terdapat 1 paket pekerjaan yang diproses melalui metode Penunjukan Langsung dengan nilai sebesar Rp. 790.000.000. Sedangkan yang lain dilakukan dengan metode Tender maupun Seleksi. Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2024 mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

b. DAU/SG

Pada Tahun 2024, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima 21 Paket PBJ yang bersumber dari DAU/SG dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**DAU/SG Tahun 2024**

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	6	30.023.668.311	5	30.023.668.311
2.	Barang	5	2.734.455.074	5	2.734.455.074
3.	Konsultansi	10	4.905.738.953	10	4.905.738.953
4.	Jasa Lain	-	-	-	-
<b>Total Paket</b>		<b>21</b>	<b>37.663.862.338</b>	<b>20</b>	<b>37.663.862.338</b>

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2024

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total 21 Jenis Paket PBJ yang bersumber dari DAU/SG Tahun 2024 yang diserahkan ke Biro PBJ, terdapat 1 Jenis Paket Pengadaan Barang yang diproses dengan metode Penunjukan Langsung senilai Rp. 1.226.550.000. Ada pula 1 paket pekerjaan Konstruksi dinyatakan Gagal Tender karena terbatasnya waktu untuk pelaksanaan pemilihan. Sedangkan paket pekerjaan lainnya dapat selesai diproses dengan menggunakan metode Tender dan Seleksi.

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ yang bersumber dari DAU Tahun Anggaran 2024, dengan hasilnya sebagai berikut:

$$\frac{20}{21} \times 100\% = 95,23\%$$

Memperhatikan data-data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ dengan sumber pembiayaan dari APBD (DAK/DAU/SG) untuk Tahun 2024, dapat dilihat dengan perhitungan:

$$\frac{43}{44} \times 100\% = 97,72\%$$

Secara umum sesuai target RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, indikator terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Realisasi dicapai 97,72% sesuai skala ordinal disimpulkan SANGAT BERHASIL karena berada di atas 85%. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterlibatan seluruh pihak, baik dari Biro PBJ sendiri maupun perangkat daerah lain sehingga seluruh proses PBJ dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari *leadership* dalam proses PBJ yang mampu mengarahkan proses PBJ tersebut. Selain itu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas seperti *hardware/software* dalam proses PBJ.

#### B. Sasaran Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ

Untuk mencapai sasaran ini didukung dengan satu indikator yakni Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Kinerja**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALI -SASI 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
				TAR- GET	REALI -SASI	CAPAI -AN		
1.	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Orang	7	4	8	8	25	25

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pemenuhan JF PPBJ adalah sebanyak 4 orang pada akhir Tahun 2024 sehingga jumlah minimal menjadi 18 orang JF PPBJ. Namun realisasi yang diperoleh lebih dari target yang direncanakan yakni ada penambahan sebanyak 8 orang JF PPBJ Jenjang Pertama sehingga pencapaian terhadap realisasi adalah **70%** dari jumlah rekomendasi LKPP yaitu 30 orang JF PPBJ. Dengan capaian ini maka sesuai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dari target pemenuhan JF PPBJ 60 % telah melampaui/sudah terpenuhi. Penambahan jumlah JF PPBJ ini tercapai melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain dan saat ini sementara berproses untuk diangkat/ditetapkan oleh kepala daerah.

jika dibandingkan pada tahun 2023 target sebanyak 15 orang realisasi hanya 7 orang atau mencapai 46,66 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada rincian sebagaimana dibawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		2024		Capaian Akhir
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Orang	12	0	15	7	4	8	70 %

*Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, 2024*

Pada tahun anggaran 2024 jumlah Pokja Pemilihan yang menangani proses pengadaan barang/jasa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dimana semuanya telah memenuhi syarat minimal sebagai anggota Pokja Pemilihan yakni telah memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Level I/Dasar. Seluruh Anggota Pokja Pemilihan ini merupakan PNS/Personil tetap pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT (UKPBJ). Dari jumlah 22 (dua puluh dua) orang tersebut, JF PPBJ sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang berkedudukan di UKPBJ sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berkedudukan di luar UKPBJ.

**C. Sasaran Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi, Efisien, Adil, Transparan, Bebas dan Bersih dari KKN**

Untuk mencapai sasaran ini didukung dengan satu indikator yakni Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Kinerja**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALI -SASI 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
				TAR- GET	REALI -SASI	CAPAI -AN		
1.	Jumlah, jenis, dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target Jumlah, jenis, dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif) pada akhir Tahun 2024 mencapai 100% dan jika dibandingkan sama dengan tahun 2023 juga mencapai 100%.

Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

Sejak Tahun 2021 s/d sekarang, proses PBJ mulai dari Perencanaan hingga Serah Terima PBJ sudah memanfaatkan sistem pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga proses pengadaan barang/jasanya terintegrasi, efisien, adil, transparan, kompetitif, bebas dan bersih dari KKN. Beberapa aplikasi yang difasilitasi oleh LPSE yaitu:

**1. Aplikasi SPSE 4.5;**

Layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dengan dengan saat ini masih menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.5.

**2. Aplikasi SiRUP;**

Media pengumuman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan bagi semua K/L/PD.

### 3. Aplikasi SIKAP;

Layanan database untuk melacak kinerja penyedia barang/jasa yang ada di seluruh Indonesia.

### 4. e-Catalog;

Aplikasi belanja *online* yang menyediakan aneka produk yang dibutuhkan K/L/PD.

### 5. Toko Daring;

Aplikasi kerja sama LKPP dengan *e-commerce* untuk pengadaan langsung dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah dan mulai tahun 2025 akan diintegrasikan pada e-Catalog.

## D. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Swakelola.

Untuk mencapai sasaran ini didukung dengan satu indikator yakni Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Indikator Kinerja**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALI -SASI 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
				TAR- GET	REALI -SASI	CAPAI -AN		
1.	Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT	Laporan	0	39	41	100 %	39	39

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT untuk tahun 2024 seuai target 39 laporan. Jumlah laporan tersebut mengacu pada jumlah perangkat daerah pada saat dilakukan penyusunan perjanjian kinerja dan saat ini terdapat 41 laporan mangacu pada jumlah perangkat daerah yang baru sesuai PERDA Provinsi NTT nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas PERDA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk tahun 2023 sasaran ini belum termasuk dalam Perjanjian Kinerja.

Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tata cara untuk memperoleh barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat (publik) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa dapat diperoleh atau dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni **Swakelola dan/atau Penyedia**. Pengadaan secara Swakelola merupakan suatu cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian / lembaga / perangkat daerah, kementerian / lembaga / perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengadaan secara Swakelola ini sangat banyak dilakukan oleh semua instansi pemerintah namun terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Selama beberapa tahun terakhir laporan realisasi pengadaan secara Swakelola yang dilaksanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah/OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT tidak terdata dengan baik. Mulai tahun 2024 sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan maka data realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola dapat dihimpun dan dicapai bahkan dianggap keberhasilannya melampaui target. Hal tersebut disebabkan adanya

penambahan/pembentukan beberapa OPD baru dari semula 39 (tiga puluh sembilan) menjadi 41 (empat satu).

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Rata-rata penyerapan anggaran mulai dari Tahun **2022** s/d Tahun **2024** di atas **90%**.

Total Anggaran Perubahan Tahun 2022 yaitu Rp. 8.029.567.101,- dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp. 7.867.604.600,- dengan rincian program sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2022**

No.	Program	DPPA 2022	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.439.961.720	Rp. 1.424.292.959
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 6.589.605.381	Rp. 6.443.311.641
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 8.029.567.101</b>	<b>Rp. 7.867.604.600</b> <b>97,98 %</b>

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Total Anggaran Perubahan Tahun 2023 yaitu Rp. 7.874.099.500,- dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp. 7.117.006.038,- dengan rincian program sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2023**

No.	Program	DPPA 2024	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.855.292.000	Rp. 1.766.800.014
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 6.018.807.500	Rp. 5.350.206.024
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 7.874.099.500</b>	<b>Rp 7.117.006.038</b> <b>90,39 %</b>

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023

Sedangkan total anggaran untuk membiayai Program dan Kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.021.504.540,- (Delapan Milyar

Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai APBD untuk membiayai 2 Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.770.407.397,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 97,28 % dengan rincian sebagaimana dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2024**

No.	Program	DPPA 2024	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.930.896.196	Rp. 1.868.363.322
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 6.056.758.512	Rp. 5.902.044.075
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 7.987.654.708</b>	<b>Rp. 7.770.407.397</b> <b>97,28 %</b>

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2024

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 mencapai **97,28%**. Untuk melihat rincian penyerapan anggaran pada 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran pada 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan**

Prog /Keg	Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp.)	Jumlah realisasi s/d 31 Desember 2024	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.930.896.196	1.868.363.322	96,76
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.956.704	78.045.900	98,85
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	19.737.632	19.722.600	99,92
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	59.219.072	58.323.300	98,49

Prog /Keg	Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp.)	Jumlah realisasi s/d 31 Desember 2024	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
		SKPD			
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.209.672	5.759.600	33,47
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.209.672	5.759.600	33,47
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.785.956	548.439.325	98,86
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100
	07	Penyediaan Bahan/Material	145.813.572	145.810.569	100
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	71.179.072	71.147.253	99,98
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.993.312	324.681.503	98,09
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.688.220	1.156.516.502	96,48
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.599.072	15.000	100
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640.579.000	626.994.371	97,88
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.999.700	2.999.378	99,99
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.510.448	510.923.753	94,70
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.255.644	79.601.995	97,96
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	71.456.572	69.803.095	97,69
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.799.072	9.798.900	100
07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.056.758.512	5.902.044.075	97,45

Prog /Keg	Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp.)	Jumlah realisasi s/d 31 Desember 2024	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	190.197.433	189.116.515	99,43
	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	21.702.000	21.695.500	99,97
	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	35.797.600	34.750.343	97,07
	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	132.697.833	132.670.672	99,98
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	246.182.727	224.327.004	91,12
	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	93.374.444	83.793.760	89,74
	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	71.696.844	70.506.844	98,34
	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	81.111.439	70.026.400	86,33
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.620.378.352	5.488.600.556	97,66
	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	155.707.508	147.370.010	94,65
	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.355.467.100	5.241.776.880	97,88
	03	Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	109.203.744	99.453.666	91,25

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2024

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Media ini juga sangat penting sebagai masukan dan umpan balik dalam pengambilan keputusan selanjutnya bagi pihak-pihak terkait. Kebijakan yang akan diterapkan selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan prinsip efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik dan keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Secara umum sesuai target RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, indikator terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Realisasi **dicapai 97,72%** dan sesuai skala ordinal disimpulkan **SANGAT BERHASIL** karena berada di atas 85%. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterlibatan seluruh pihak, baik dari Biro PBJ sendiri maupun perangkat daerah lain sehingga seluruh proses PBJ dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari leadership dalam proses PBJ yang mampu mengarahkan proses PBJ tersebut. Selain itu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas seperti *hardware/software* dalam proses PBJ.

Target pemenuhan JF PPBJ adalah sebanyak 4 orang pada tahun 2024, realisasinya melampaui target yang direncanakan karena adanya penambahan sebanyak **8 orang JF PPBJ** untuk Jenjang Pertama sehingga pencapaian terhadap

realisasi adalah **70%** dari jumlah rekomendasi LKPP yaitu 30 orang JF PPBJ. Dengan adanya penambahan personil JF PPBJ ini maka sesuai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 telah memenuhi target minimal pemenuhan JF PPBJ 60%.

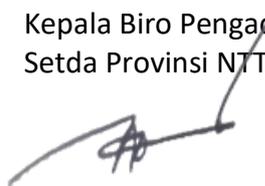
Sedangkan terkait dengan proses PBJ mulai dari Perencanaan hingga Serah Terima PBJ sudah memanfaatkan sistem pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan telah terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN melalui Aplikasi LSPE yaitu: SPSE 4.5, SiRUP, SiKAP, e-Katalog dan Toko Daring.

Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola mulai tahun 2024 ini sudah dapat terhimpun datanya dalam **39 Laporan** sesuai target yang ditetapkan. Mengikuti kondisi faktual yang terjadi, realisasi pelaporan pelaksanaan PBJ secara Swakelola melampaui target tersebut karena adanya penambahan beberapa OPD yang baru.

Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu serta atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2024.

Kupang, Januari 2025

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Provinsi NTT



Adelino da Cruz Soares, AKS., MPS.Sp.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750308 199903 1 004